

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia termasuk dalam negara kepulauan dengan jumlah penduduk yang mencapai ratusan juta jiwa. Hal ini menjadikan Indonesia kaya akan berbagai potensi diantaranya potensi alam, adat istiadat, budaya, hingga bahasa. Kelebihan tersebut menjadi daya tarik tersendiri yang kemudian dijadikan sebagai objek wisata yang dapat menarik banyak wisatawan asing maupun domestik. Dengan meningkatnya daya tarik wisata, sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah Indonesia untuk membangun dan mengembangkan industri pariwisata. Sektor pariwisata saat ini merupakan salah satu ujung tombak penggerak pertumbuhan Indonesia. Dengan berkembangnya sektor pariwisata Indonesia maka kedepannya diharapkan juga dapat meningkatkan devisa negara, khususnya yang bersumber dari kepariwisataan, meningkatnya lapangan kerja bagi penduduk, serta meningkatnya kualitas kepariwisataan Indonesia di kancah global.

Pariwisata akan berkembang dengan baik jika dalam pengelolaannya dilakukan secara bijak. Memperhatikan kelestarian alam serta budaya disekitar potensi pariwisata sangat dibutuhkan dalam pengembangan pengelolaan pariwisata kedepannya. Kelestarian yang dimaksud yaitu keberlangsungan pariwisata yang memberikan dampak positif bagi perekonomian, kehidupan sosial, dan lingkungan

sekitar namun dengan memperhatikan prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk mendukung kehidupan di masa depan, meningkatkan ketersediaan lapangan kerja bagi penduduk lokal untuk alternatif meningkatkan perekonomian daerah.

Salah satu prinsip dari pembangunan berkelanjutan adalah konsep pembangunan desa wisata (UNEP dan WTO, 2005). Desa wisata adalah tempat kepariwisataan dengan basis potensi pedesaan, segala keunikan serta daya tarik dari desa yang kemudian diberdayakan dan dikembangkan sebagai produk wisata (Sudibya, 2018). Konsep desa wisata saat ini tengah menjadi sorotan pemerintah Indonesia. Sejalan dengan tujuan dari pembangunan kepariwisataan Indonesia, pemerintah kemudian mengembangkan desa wisata yang memiliki tujuan agar dapat meningkatkan pertumbuhan penduduk lokal, menghapus nilai kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, dan memajukan kebudayaan lokal (Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kementrerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto dalam Siaran PERS HM.4.6/458/SET.M.EKON.3/12/2021). Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia memperkuat pemberdayaan desa melalui program desa wisata. Program ini menargetkan terbentuknya 2.000 desa wisata yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dalam Buku Membangun Desa “Pedoman Desa Wisata” (Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2021) Desa Wisata dilihat berdasarkan kriteria :

1. Memiliki potensi daya tarik wisata (Daya tarik wisata alam, budaya, dan buatan/karya kreatif)
2. Memiliki komunitas masyarakat
3. Memiliki potensi sumber daya manusia lokal yang dapat terlibat dalam aktivitas pengembangan desa wisata
4. Memiliki kelembagaan pengelolaan
5. Memiliki peluang dan dukungan ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana dasar untuk mendukung kegiatan wisata dan
6. Memiliki potensi dan peluang pengembangan pasar wisatawan

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di bagian tengah Pulau Jawa. Jawa Tengah memiliki potensi pariwisata yang cukup banyak dan lengkap. Mulai dari pariwisata alam, pariwisata budaya serta pariwisata buatan, hal ini yang kemudian dapat menarik banyaknya wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Berdasarkan data terbaru dalam Buku Statistik Pariwisata Jawa Tengah Dalam Angka 2021 (2021), disebutkan bahwa Jawa Tengah memiliki daya tarik wisata sebanyak 1.130 dengan rincian 418 wisata alam, 175 wisata budaya, 365 wisata buatan, 76 wisata minat khusus dan 96 destinasi wisata lain lain (*event*).

Tabel 1.1 Jumlah Wisatawan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 - 2021

Tahun	Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Domestik
2017	781.107	40.118.470
2018	677.168	49.943.607
2019	691.699	57.900.863
2020	78.290	22.629.085
2021	1.793	21.332.409

Sumber : Buku Saku Profil Pariwisata & Ekonomi Kreatif Dalam Angka 2022
Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah (2022)

Jawa Tengah menjadi wilayah dengan jumlah kunjungan terbesar di Indonesia. Pada Tabel 1.1 diperlihatkan jumlah wisatawan pada tahun 2017 hingga 2019 terus mengalami peningkatan yang signifikan, sedangkan pada tahun 2020 hingga 2021 mengalami penurunan. Disimpulkan dalam Buku Saku Profil Pariwisata & Ekonomi Kreatif Dalam Angka 2022 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah (2022) capaian jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara pada tahun 2021 belum lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020.

Kota Semarang sebagai ibukota Jawa Tengah, tentunya menjadi salah satu sasaran utama wisatawan untuk berkunjung. Beberapa daya tarik wisata yang ada di Kota Semarang diantaranya yaitu wisata buatan, budaya, alam, religi, wisata

minat khusus, dan lain lain. Banyaknya potensi tersebut menjadikan Kota Semarang sebagai salah satu kawasan yang menarik untuk dikunjungi.

Tabel 1.2 Jumlah Wisatawan Kota Semarang Tahun 2019 - 2021

Tahun	Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Domestik
2018	66.107	5.703.282
2019	82.000	7.200.000
2020	6.628	3.260.303
2021	30	2.400.000
2022	144.429	44.949.504

Sumber : Data Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang (2018-2022)

Pada tabel 1.2 diperlihatkan jumlah wisatawan pada tahun 2018 – 2019 mengalami peningkatan, sedangkan pada tahun 2020 hingga 2021 mengalami penurunan. Kunjungan wisatawan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2022, menjadi yang terbanyak sejak pandemi Covid-19 mulai melanda pada tahun 2019. Meningkatnya kunjungan wisata tersebut menjadi bukti bahwa Kota Semarang merupakan salah satu destinasi wisata yang banyak menjadi sasaran baik wisatawan domestik ataupun wisatawan mancanegara.

Keberadaan desa wisata saat ini memiliki daya pikat yang potensial, didukung dengan banyaknya ragam tradisi dan kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Prinsip utama yang dikembangkan oleh desa sendiri adalah bagaimana nilai-nilai luhur yang sudah terjaga sejak lama dapat dilestarikan hingga saat ini.

Pengembangan kepariwisataan dengan melalui potensi desa wisata menjadi salah satu sektor yang saat ini sedang gencar dikembangkan oleh Pemerintah Kota Semarang. Pengembangan desa wisata juga merupakan salah satu percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2021).

Tabel 1.3 Daftar Desa Wisata di Kota Semarang

Kecamatan	Desa	Potensi Desa Wisata
Gunung Pati	Cepoko	Kebun buah
Gunung Pati	Jatirejo	Kuliner kolang kaling
Gunung Pati	Kandri	Wisata perahu
Gunung Pati	Nongkosawit	Omah pang
Mijen	Kedungpane	Curug Gondoriyo
Mijen	Wonolopo	Edukasi Bahasa Inggris
Tugurejo	Tugurejo	Mangrove

Sumber : SiKENANG Kota Semarang

Berdasarkan tabel 1.3 disebutkan bahwa desa wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kota Semarang berjumlah 7 desa dengan potensi yang berbeda beda. Salah satu desa wisata yang memiliki potensi untuk berkembang yaitu Desa Wisata Jatirejo dengan letak wilayah di Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang. Mengingat Desa Wisata Jatirejo merupakan salah satu pengrajin dan pengolah kolang-kaling terbesar di Kota Semarang, maka hal tersebut menjadi salah satu potensi yang dapat dikembangkan di Desa Wisata Jatirejo. Desa Wisata Jatirejo

telah ditetapkan sebagai Desa Wisata melalui Keputusan Walikota Semarang No. 556/819 Tentang Penetapan Desa Wisata.

Desa Wisata Jatirejo terletak di Kecamatan Gunungpati, Kelurahan Jatirejo. Desa Wisata Jatirejo terdiri dari 4 Rukun Warga dimana masing masing tempat memiliki karakteristik yang berbeda. Seperti di RW 01 memiliki Kampung Kokolaka yaitu pusat olahan kolang kaling, lalu RW 02 memiliki Kampung Kambera yaitu kampung cabe rawit dengan olahan cabe rawit. Sedangkan RW 03 memiliki Kampung Kajera yaitu Kampung Jahe Merah dengan berbagai olahan makanan dan minuman dari jahe merah, dan yang terakhir yaitu RW 04 memiliki Kampung Jamkris yaitu Kampung Jambu Kristal dengan potensi wisata yaitu berbagai olahan makanan dan minuman dari jambu kristal.

Desa Wisata Jatirejo juga memiliki beragam potensi dengan memanfaatkan bentang alam yang ada. Salah satunya yaitu *river tubing*. Namun saat ini potensi tersebut belum dapat dikembangkan secara optimal. Dilansir dari jatengnews.id (2022), salah satu pengunjung yaitu Fawwaz Alif Putra Hidayanto selaku Kenang Kota Semarang berpendapat mengenai salah satu potensi wisata di Desa Jatirejo yaitu *river tubing*, ia mengungkapkan bahwa akses menuju lokasi cenderung sulit dilalui serta tempat wisata belum tertata dengan rapi.

Daerah di sekitar Desa Wisata Jatirejo tersebut memiliki beragam wisata lain diantaranya yaitu Desa Wisata Kandri, Desa Wisata Wonolopo, Waduk Jatibarang, Goa Kreo dan masih banyak lagi. Beberapa potensi wisata tersebut merupakan tempat wisata yang telah berkembang lebih lama dibandingkan dengan Desa Wisata

Jatirejo. Dengan demikian, Desa Wisata Jatirejo diharuskan untuk memiliki wisata penunjang agar dapat berkembang seperti wisata di sekitarnya. Berikut jumlah kunjungan wisatawan di Desa Wisata Jatirejo Gunungpati :

Tabel 1.4 Data Kunjungan Desa Wisata Jatirejo

No.	Tahun	Bulan	Jumlah Kunjungan
1	2022	Desember	144
2	2023	Januari	130
3	2023	Februari	39

Sumber : Data Berbagai Sumber, 2023

Berdasarkan tabel 1.4 jumlah pengunjung pada bulan Desember 2022 hingga Februari 2023 mengalami penurunan drastis. Dalam kurun waktu 3 bulan tersebut, jumlah kunjungan paling tinggi ada di bulan Desember dengan jumlah 144 orang. Pengembangan pariwisata sangat bergantung pada jumlah kunjungan wisatawan mancanegara maupun domestik. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan Desa Wisata masih belum berjalan dengan optimal.

Kendala dalam pengembangan desa wisata tidak dialami oleh Desa Wisata Jatirejo saja, terdapat beberapa permasalahan yang juga terjadi di daerah potensi wisata yang lain. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Tyas & Damayanti (2018) mengenai “Potensi Pengembangan Desa Kliwonan sebagai Desa Wisata Batik di Kabupaten Sragen” yang menunjukkan bahwa kegiatan wisata di Desa Kliwonan masih belum berjalan dengan baik dikarenakan aksesibilitas menuju desa yang sulit dicapai serta kelembagaan khusus untuk mengelola pariwisata di tingkat desa

belum berjalan dengan maksimal. Hal ini menjadi tantangan besar bagi seluruh *stakeholders*, utamanya bagi masyarakat lokal karena pengembangan wisata Desa Kliwonan merupakan bentuk wisata dengan basis masyarakat (Tyas & Damayanti, 2018). Adapun penelitian lain dilakukan oleh Paristha, dkk (2022) mengenai “Peran Stakeholders dalam Pengembangan Desa Wisata Kerta Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar” yang menunjukkan bahwa pengembangan desa wisata yang ada belum optimal dikarenakan *stakeholders* yang terlibat tidak menjalankan peran mereka dengan sebagaimana mestinya. Berdasarkan beberapa permasalahan terkait pengembangan desa wisata tersebut menunjukkan bahwa pentingnya peran *stakeholders* dalam suatu pengembangan desa wisata. Untuk kembali meningkatkan kepariwisataan Desa Wisata Jatirejo, dibutuhkan peran dari *stakeholders* setempat dalam pengelolaan pengembangan desa wisata.

Optimalisasi pembangunan dan pengembangan pariwisata membutuhkan peran aktif *stakeholders* (Talib dalam Rachma, 2023). Potensi wisata akan cepat berkembang jika dalam pengelolaannya melibatkan peran *stakeholders*. Adanya keterlibatan *stakeholders* dalam pengembangan desa wisata berfungsi untuk mempercepat peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengelolaan potensi kepariwisataan yang ada, lalu meningkatkan daya saing antar daerah dan meningkatkan jumlah wisatawan dari luar daerah.

Alonso (2015) berpendapat bahwa pengembangan pariwisata berkelanjutan erat hubungannya dengan keterlibatan *stakeholders* yang ada. Urgensi peningkatan peran *stakeholders* dalam upaya pengembangan pariwisata akan memberikan

dampak jangka panjang baik dalam aspek ekonomi, ekologi dan sosial kultural. Melalui kontribusi melalui kerjasama antar pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait maka diharapkan dapat membantu desa wisata mengatasi permasalahan yang ada dan mempercepat pengembangan desa wisata karena tiap *stakeholders* bekerja sesuai dengan peran dan fungsinya masing masing (Paristha, dkk, 2022).

Desa Wisata Jatirejo dikelola secara swadaya oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dibawah pengawasan Dinas Pariwisata Kota Semarang. Hingga saat ini, pengelolaan masih dipegang secara mandiri oleh Pokdarwis. Penelitian yang dilakukan oleh Vickarohmila dan Kurnianingtyas (2022) menjabarkan bahwa dalam pengelolaannya oleh Pokdarwis dirasa belum optimal karena masih terfokus pada beberapa daya tarik wisata saja dan belum mampu melakukan pemberdayaan masyarakat baik dari aspek pengembangan daya tarik wisata maupun pengembangan pelayanan wisata.

Selain Pokdarwis, keterlibatan pihak lain juga berpengaruh dalam pengelolaan Desa Wisata Jatirejo. Desa Wisata Jatirejo hingga kini telah membangun jejaring kerja sama dengan beberapa pihak, diantaranya yaitu pemerintah daerah, kedinasan dan akademisi, selain itu dibutuhkan juga keterlibatan beberapa pihak internal diantaranya yaitu penduduk lokal dan lembaga swadaya masyarakat. Kerja sama ini dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi desa wisata dan memberikan manfaat bagi perekonomian dan kesejahteraan penduduk lokal di Desa Wisata Jatirejo.

Desa wisata sesungguhnya dibentuk untuk mensejahterakan masyarakat lokal dengan memanfaatkan potensi autentik yang dimiliki wilayah tersebut. Berbagai *stakeholders* yang terlibat diharuskan untuk saling mendukung dan berkoordinasi guna mewujudkan tujuan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa (Khomzi dkk, 2021). Dalam proses pengembangan desa wisata yang optimal maka akan menghasilkan *output* yang optimal pula, dikarenakan dalam implementasinya peran *stakeholders* harus berhasil dalam memajukan desa wisata yang sedang dalam tahap pengembangan. Jika *stakeholders* dapat memberikan kinerja yang baik menggunakan kapasitas yang ada maka dapat disimpulkan jika organisasi tersebut mampu memberi pengaruh yang berdampak positif bagi kemajuan sistem sosial desa. Maka dari itu, keterlibatan serta partisipasi aktif *stakeholders* sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan tersebut.

Latar belakang di atas kemudian menjadikan alasan mengapa penelitian mengenai “Analisis Peran *Stakeholders* dalam Pengembangan Desa Wisata Jatirejo” ini penting untuk dilakukan untuk kemudian dinilai mengapa *stakeholders* yang ada belum berjalan secara maksimal serta faktor yang mempengaruhinya.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, diperoleh identifikasi masalah, meliputi :

- Potensi wisata di Desa Wisata Jatirejo yang belum dikembangkan dan dikelola dengan baik.
- Jumlah kunjungan wisatawan yang terus menurun.

- Kurang optimalnya keterlibatan lembaga swadaya masyarakat.
- Belum optimal membangun kemitraan dengan berbagai *stakeholders*.
- Kurang optimalnya promosi potensi wisata yang ada.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran *stakeholders* dalam pengembangan Desa Wisata Jatirejo Gunungpati?
2. Faktor apa yang menjadi pendorong dan penghambat peran *stakeholders* dalam pengembangan desa wisata Jatirejo Gunungpati?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis peran *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan desa wisata Jatirejo Gunungpati.
2. Mengidentifikasi faktor yang menjadi pendorong dan penghambat peran *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan desa wisata Jatirejo Gunungpati.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah serta mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang administrasi publik khususnya keilmuan

manajemen publik terkait peran stakeholders dalam pengelolaan desa wisata dan dapat digunakan sebagai referensi penelitian terkait di masa depan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- a) Bagi Pemerintah Kota Semarang dapat dijadikan sebagai pengembangan sektor pariwisata yang mampu mendukung perekonomian daerah.
- b) Bagi pengelola dapat dijadikan sebagai evaluasi dalam pengelolaan kawasan desa wisata agar dapat meningkatkan wisatawan untuk berkunjung.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penyusunan topik penelitian, penulis turut menggunakan rujukan dari beberapa penelitian dalam rangka menambah referensi dalam penulisan.

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang penulis temukan.

Tabel 1.5 Penelitian Terdahulu

No.	Nama Jurnal, Nama Penulis, Judul	Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Teori yang Digunakan	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Profesi Humas, Volume 4, No. 1, 2019, hlm. 23-46, tahun 2019 Peran <i>stakeholders</i> dalam membangun	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai peran <i>stakeholders</i> dalam membangun daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah kabupaten Purwakarta sangat dominan dalam	Penelitian ini berfokus pada peran stakeholders bagi peningkatan nilai budaya sedangkan peneliti berfokus

No.	Nama Jurnal, Nama Penulis, Judul	Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Teori yang Digunakan	Hasil Penelitian	Perbedaan
	<p>identitas Purwakarta yang berwawasan nilai budaya lokal</p> <p>Susie Perbawasari, Susanne Dida, dan Aat Ruchiat Nugraha</p>	<p>Purwakarta yang berwawasan nilai budaya Sunda yang dapat menjadi identitas daerah.</p> <p>Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, <i>focus group discussion</i>, dan studi pustaka.</p> <p>Penelitian ini menganalisis peran stakeholders menggunakan terori triple helix.</p>	<p>mengembangkan proses pembangunan yang berwawasan nilai budaya Sunda terutama semenjak kepemimpinan Bupati Dedi Mulyadi.</p> <p>Kemudian, adanya sinergis antar <i>stakeholders</i> di Purwakarta telah memberikan dampak yang baik bagi keterkenalan pembangunan Purwakarta sebagai salah satu kabupaten yang memiliki identitas dan menjadi tujuan destinasi wisata baru di Jawa Barat.</p>	<p>pada peran stakeholders dalam pengembangan desa wisata.</p>
2	<p>Jurnal Pariwisata Pesona, Volume 6 No. 1 Juni 2021</p> <p>Implementasi Peran Stakeholders dalam Pengembangan Pariwisata (Studi Kasus pada Kepulauan Banda)</p> <p>Elvis Salouw</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan lebih lanjut mengenai peran <i>stakeholders</i> yang terlibat dalam perkembangan pariwisata Kecamatan Banda</p> <p>Metode yang digunakan yaitu</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengembangan pariwisata Kecamatan Banda terdapat, peran masing pemangku kepentingan umumnya sudah berjalan, namun beberapa dari mereka tidak maksimal.</p>	<p>Penelitian ini membagi peran <i>stakeholders</i> menjadi 3 kelompok yaitu <i>stakeholders</i> pemerintah, <i>stakeholders</i> swasta dan masyarakat sedangkan peneliti metode peran <i>stakeholders</i></p>

No.	Nama Jurnal, Nama Penulis, Judul	Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Teori yang Digunakan	Hasil Penelitian	Perbedaan
		<p>kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan interpretasi sejarah kawasan Banda pada masa lalu.</p> <p>Penelitian ini menganalisis peran stakeholders dengan membedakannya menjadi 3 kelompok yaitu ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stakeholder pemerintah - Stakeholder swasta, - Masyarakat 	<p>Sehingga masih diperlukan adanya kerjasama yang maksimal antar semua <i>stakeholders</i> yang ada.</p>	<p>menurut (Nugroho, 2015)</p>
3	<p>JUMPA Volume 8, Nomor 2, tahun 2022</p> <p>Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Desa Wisata Kerta Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar</p> <p>Ni Putu Tiya Paristha, I Nyoman Sukma Arida, Gde Indra Bhaskara</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran stakeholders dan menentukan model kerja sama stakeholders yang sinergis dalam pengembangan Desa Wisata Kerta Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar.</p> <p>Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif.</p> <p>Penelitian ini menganalisis peran stakeholders</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh unsur stakeholders telah menjalankan perannya masing-masing dalam pengembangan desa wisata, namun keterlibatan dari pihak bisnis dan unsur media masih tergolong rendah. Hasil dari model kerja sama stakeholders yaitu pihak komunitas atau</p>	<p>Penelitian ini menggunakan teori pentahelix dalam analisisnya sedangkan peneliti menggunakan metode peran stakeholders menurut (Nugroho, 2015)</p>

No.	Nama Jurnal, Nama Penulis, Judul	Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Teori yang Digunakan	Hasil Penelitian	Perbedaan
		menggunakan teori stakeholder dengan pendekatan pentahelix.	masyarakat lokal ditempatkan sebagai sentral karena merupakan penggerak utama kegiatan desa wisata.	
4	<p>Journal of Public Policy and Management Review, 2018</p> <p>Analisis Stakeholders (Aktor Kebijakan) Dalam Pengembangan Obyek Wisata Candi Gedongsongo di Kabupaten Semarang</p> <p>Tsuraya Annisa Salsabila, R. Slamet Santoso</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran stakeholders dan hubungan stakeholders dalam pengembangan obyek wisata Candi Gedongsongo.</p> <p>Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif.</p> <p>Penelitian ini menganalisis peran stakeholders menggunakan teori menurut Clarkson (dalam Gabler Edition Wissenschaft (2008:6)) dengan membedakan stakeholders berupa stakeholders primer dan stakeholders sekunder. Lalu membagi</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat total tujuh stakeholders yang memiliki peran dalam pengembangan obyek wisata Candi Gedongsongo. Efektifitas peran stakeholders dalam pengembangan Candi Gedongsongo belum efektif karena terdapat stakeholders yang masih belum melaksanakan tugasnya dengan baik dan belum adanya koordinasi yang optimal yang membuat pengembangan menjadi lambat.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan teori Clarkson yang membagi stakeholders menjadi stakeholders primer dan sekunder serta mengurutkan stakeholders berdasarkan tingkat kepentingan dalam analisisnya sedangkan peneliti menggunakan teori peran stakeholders menurut (Nugroho, 2014)</p>

No.	Nama Jurnal, Nama Penulis, Judul	Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Teori yang Digunakan	Hasil Penelitian	Perbedaan
		stakeholders menurut tingkat ketertarikan dan pengaruh serta kepentingannya.		
5	<p>Journal Management, Business, and Accounting, 2020</p> <p>Analisis Stakeholder di Wilayah Operasional Perusahaan Pertambangan Migas</p> <p>Rabin Ibnu Zainal</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang atribut dari setiap stakeholder terkait dengan kekuasaan, pengaruh, dan legitimasi.</p> <p>Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif.</p> <p>Penelitian ini menganalisis peran stakeholders dengan menilai atributnya dari sisi power, legitimacy, dan urgency. Kemudian mengkategorikannya menurut tiga kategori dari (Freeman, 2010) :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Stakeholders publik - Stakeholders publik yang terorganisir - Stakeholders yang terorganisir secara semu. 	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis stakeholder berfungsi untuk memberi gambaran bagi perusahaan pertambangan migas terkait stakeholders yang berdampak bagi kegiatan operasional. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kompleksitas dalam struktur dan tatanan sosial yang ada. Kemudian masih diperlukan adanya strategi pendekatan dari setiap pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan aspek yang dipegang oleh stakeholders tersebut.</p>	<p>Penelitian ini lebih berfokus pada analisis stakeholders di wilayah perusahaan pertambangan migas sedangkan peneliti berfokus pada pengembangan desa wisata.</p>

No.	Nama Jurnal, Nama Penulis, Judul	Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Teori yang Digunakan	Hasil Penelitian	Perbedaan
6	<p>Jurnal Destinasi Pariwisata, 2019</p> <p>Analisis Peran Stakeholder Desa Wisata Carangsari, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung</p> <p>Shafa Raya Cahyana, Saptono Nugroho</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana keberlangsungan peran stakeholder di Desa Wisata Carangsari, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung.</p> <p>Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif.</p> <p>Penelitian ini menganalisis peran stakeholders dengan menilainya menurut status, hak, serta kewajiban, juga berdasarkan aspek aktifnya yaitu sebagai fasilitator, investor dan partisipator.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Wisata Carangsari memiliki tiga pilar pariwisata yang aktif dalam melaksanakan keberlangsungan pariwisata. Namun masih kurangnya koordinasi dan komunikasi menjadi salah satu penghambat dalam perkembangan desa wisata ini.</p>	<p>Penelitian ini menganalisis peran stakeholders dengan menilainya menurut status, hak, serta kewajiban sedangkan peneliti menggunakan metode peran stakeholders menurut (Nugroho, 2014)</p>
7	<p>2019</p> <p>The role of stakeholders and their participation network in decision-making of urban renewal in China: The case of Chongqing</p> <p>Taozhi Zhuang, Queena K. Qian, Henk J. Visscher,</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk memahami pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan pembaruan perkotaan di Cina.</p> <p>Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan tingginya kompleksitas karakteristik pemangku kepentingan dan jaringan interaksi di antara mereka selama pengambilan keputusan pembaruan</p>	<p>Penelitian ini berfokus pada peran stakeholders dalam partisipasinya sebagai pembuat kebijakan di daerah perkotaan sedangkan peneliti berfokus pada</p>

No.	Nama Jurnal, Nama Penulis, Judul	Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Teori yang Digunakan	Hasil Penelitian	Perbedaan
	Marja G. Elsinga , Wendong Wu	Penelitian ini menganalisis peran stakeholders menggunakan teori kombinasi analisis pemangku kepentingan dengan mengevaluasi pemangku kepentingan serta membandingkan kekuatan dan tingkat kepentingan antar pemangku kepentingan dan analisis jaringan sosial dengan memetakan interaksi antar pemangku kepentingan.	perkotaan. Karena sebagian besar proyek pembaruan perkotaan di Cina dipimpin oleh pemerintah, tentu saja, pemerintah memainkan peran dominan dalam proses pengambilan keputusan. Namun, terlalu banyak sektor pemerintah di berbagai tingkat administrasi yang terlibat dalam proses tersebut juga menimbulkan hambatan besar. Selain itu, minimnya partisipasi publik dipandang sebagai penyebab utama konflik antara masyarakat dengan pemangku kepentingan lainnya.	pengembangan desa wisata.
8	International Journal of Information Management (253-270), 2019	Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi e-government dengan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa stakeholder e-government meliputi pemerintah	Penelitian ini lebih berfokus pada mengkaji implementasi e government melalui analisis stakeholders

No.	Nama Jurnal, Nama Penulis, Judul	Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Teori yang Digunakan	Hasil Penelitian	Perbedaan
	<p>The role of stakeholders in the effective use of e-government resources in public services</p> <p>Olusoyi Richard Ashaye, Zahir Irani</p>	<p>mencoba untuk meninjau secara kritis peran pemangku kepentingan yang terlibat dalam implementasi e-Government dan aktivitas mereka dalam hubungan <i>government to employee</i></p> <p>Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif.</p> <p>Penelitian ini menganalisis peran stakeholders dengan membaginya menjadi tiga bagian yaitu</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. faktor Implementasi – Eksternal dan Internal, 2. Pemangku Kepentingan Utama, dan 3. Siklus Hidup Pengembangan - Pra-implementasi 	<p>(kementerian/lembaga), negara maju secara teknologi, perusahaan dan pengguna (majikan/warga negara). Peran dan tugas pemangku kepentingan bervariasi dari fase 'pra-implementasi' (inisiasi) hingga 'selama implementasi' (perencanaan dan implementasi), dan 'pasca implementasi' (pemantauan dan evaluasi). Organisasi publik perlu menyusun strategi hubungan mereka dengan pemangku kepentingan untuk mencapai kepentingan kolektif untuk implementasi e-government yang sukses.</p>	<p>sedangkan peneliti berfokus pada pengembangan desa wisata melalui peran stakeholders yang ada.</p>
9	<p>Tourism Review, Vol. 75 No. 3, 2020</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa para pemangku</p>	<p>Penelitian ini lebih berfokus pada mengkaji pemangku</p>

No.	Nama Jurnal, Nama Penulis, Judul	Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Teori yang Digunakan	Hasil Penelitian	Perbedaan
	<p>The identity and role of stakeholders in the medical tourism industry: state of the art</p> <p>Ahmed Kamassi, Noor Hazilah Abd Manaf and Azura Omar</p>	<p>stakeholders yang terlibat, menganalisis peran stakeholders, menganalisis hubungan antar stakeholders, dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat.</p> <p>Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif.</p> <p>Penelitian ini menganalisis peran stakeholders dengan membaginya berdasarkan keberlangsungan <i>medical tourism industry</i> yang terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Medical tourist</i> - <i>Healthcare providers</i> - <i>Government agencies</i> - <i>Facilitators</i> - <i>Accreditation and credentialing bodies</i> - <i>Healthcare marketers</i> - <i>Insurance providers</i> - <i>Infrastructure and facilities</i> 	<p>kepentingan mengambil prosedur aktif untuk mempromosikan perluasan pariwisata medis secara global. Setiap pemangku kepentingan memiliki peran dan tanggung jawab tertentu untuk memastikan pertumbuhan yang konsisten. Pemangku kepentingan tidak bisa berperan sebagai pemain independen dalam industri. Oleh karena itu, kolaborasi pemangku kepentingan menjadi strategi yang tepat dalam meningkatkan perkembangan industri.</p>	<p>kepentingan dalam industri pariwisata medis sedangkan peneliti berfokus pada pengembangan desa wisata melalui peran stakeholders yang ada.</p>

No.	Nama Jurnal, Nama Penulis, Judul	Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, Teori yang Digunakan	Hasil Penelitian	Perbedaan
10	<p>Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN), Vol. 08 No. 02, 2020</p> <p>Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>Riska Destiana, Kismartini, Tri Yuningsih</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk memahami pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan pembaruan perkotaan di Cina.</p> <p>Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif.</p> <p>Penelitian ini menganalisis peran stakeholders menggunakan model pentahelix</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengembangan pariwisata halal di Pulau Penyengat terdapat keterlibatan beberapa stakeholders yang kemudian dijabarkan dalam diagram pentahelis. Stakeholders tersebut terdiri dari pihak akademisi, bisnis, komunitas, pemerintah dan media massa. Peran stakeholders digambarkan melalui policy creator, koordinator, fasilitator, implementator dan akseptator. Lalu ditemukan pula faktor pendukung dan penghambat diantaranya yaitu nilai, komunikasi, kepercayaan, dan kebijakan.</p>	<p>Penelitian ini menggunakan model pentahelix dan lebih berfokus pada destinasi wisata halal serta memiliki lokus di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau sedangkan peneliti lebih berfokus pada pengembangan desa wisata dan memiliki lokus di desa wisata Jatirejo Kota Semarang.</p>

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu diatas, terdapat lima penelitian yang berfokus pada pengembangan kepariwisataan dan pengembangan desa wisata. Adanya penelitian terdahulu tersebut menggambarkan bahwa membuat analisis mengenai peran *stakeholders* dalam suatu pengembangan desa wisata menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Penelitian tersebut dijadikan referensi peneliti dalam melihat permasalahan yang terjadi dalam suatu pengembangan desa wisata yang telah dilakukan sebelumnya oleh berbagai daerah. Beberapa fokus penelitian yang telah dilakukan diatas memiliki keasamaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu mengenai analisis peran *stakeholders* dalam pengembangan desa wisata.

Penelitian ini memiliki fokus untuk mengupas mengenai peran *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan desa wisata Jatirejo dengan mengacu pada teori peran *stakeholders* milik Nugroho (2015). Penelitian berfokus untuk membahas peran *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Jatirejo sehingga akan menjelaskan lebih mendalam mengenai analisis *stakeholders* dan faktor apa saja yang mempengaruhi hal tersebut.

1.5.2 Administrasi Publik

Administrasi publik terdiri dari dua kata yaitu administrasi dan publik. Administrasi sebagaimana dimaksud oleh Herbert A. Simon yang dikutip oleh Syafiie (2006:13), "*administration can be defined as the activities of groups cooperating to accomplish common goals*", yang berarti administrasi dijabarkan sebagai kegiatan-kegiatan kelompok kerja sama untuk mencapai tujuan-tujuan bersama. Menurut Chandler dan Plano yang dikutip oleh

Yeremias T. Keban (2014:13), administrasi disebutkan sebagai proses dimana keputusan dan kebijakan diimplementasikan. Dengan demikian, administrasi dapat diartikan sebagai proses kegiatan kerja sama sekelompok orang untuk mencapai tujuan.

Sedangkan kata publik dalam administrasi publik berasal dari bahasa Inggris yaitu *public* yang berarti umum, masyarakat, atau negara (Syafiie, 2006:117). McCurdy dalam Keban (2014:3) menjabarkan bahwa administrasi publik dapat dilihat sebagai suatu proses politik, yang berarti administrasi publik merupakan salah satu metode yang digunakan pemerintah suatu negara untuk melakukan berbagai fungsi negara yang ada. Sedangkan Chandler dan Plano (1988:29-30) mendefinisikan administrasi publik sebagai proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Dapat disimpulkan bahwa administrasi publik merupakan kegiatan kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam rangka mencapai tujuan umum atau tujuan negara.

Berperan sebagai salah satu cabang keilmuan, administrasi publik memiliki objek material dan objek formal seperti bidang keilmuan lainnya. Objek material merupakan objek yang bersifat umum karena merupakan objek yang dibahas secara global tentang pokok persoalan, lalu yang dimaksud dengan objek formal merupakan objek yang bersifat khusus dan spesifik karena merupakan pusat perhatian suatu disiplin ilmu pengetahuan. Syafiie (2000:33) mengungkapkan objek material dalam administrasi publik meliputi negara

sebagai penyelenggara administrasi publik. Sedangkan objek formal dalam administrasi publik antara lain yaitu pelayanan publik, organisasi publik, manajemen publik, dan kebijakan publik. Unsur objek-objek formal dalam administrasi publik dalam implementasinya memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain dan terdiri dari manajemen dalam setiap tahapan kebijakan, serta membutuhkan organisasi publik untuk dapat melakukan setiap tahapan kebijakan.

1.5.3 Manajemen Publik

Luther Gulick mendefinisikan manajemen sebagai bidang ilmu pengetahuan (*science*) yang mempelajari secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama dalam mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama ini menjadi lebih bermanfaat bagi kemanusiaan.

Manajemen publik sebagai salah satu disiplin ilmu manajemen yang mempelajari mengenai penerapan dalam sektor publik dalam pengelolaan sebuah pelaksanaan kebijakan di sektor publik.

Keban (2008) menyebutkan bahwa dimensi manajemen berkaitan dengan bagaimana menerapkan prinsip-prinsip manajemen untuk kemudian diimplementasikan sebagai suatu kebijakan publik. Menekankan pada penerapan model, teori, metode, teknik, serta cara mencapai tujuan dengan efisien dan efektif. Sebaik baiknya suatu kebijakan jika dalam pelaksanaannya kurang ditunjang dengan metode serta teknik implementasi yang memadai, maka kebijakan tersebut akan sia-sia.

Pengembangan desa wisata tentu tidak dapat dilakukan oleh satu aktor saja melainkan harus melibatkan beberapa aktor atau *stakeholders*. Aktor yang dimaksud dapat berasal dari kalangan pemerintah, masyarakat, lembaga pendidikan, kelompok-kelompok penekan, dan organisasi - organisasi komunitas. Fungsi manajemen publik seperti mengorganisir, mengarahkan, dan mengawasi masyarakat dalam keberlangsungan pengembangan pariwisata merupakan salah satu implementasi dari kebijakan yang dilakukan pemerintah.

1.5.4 Stakeholders

Stakeholders sebagaimana dimaksud oleh Kusmedi dan Bisjoe (dalam Sulastri, 2017) diartikan sebagai pihak yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh dampak dari keputusan yang diambil. Sedangkan Schemeer (2000) menyebutkan bahwa “*stakeholders in a process are actors persons, groups or organizations with a vested interest in the policy being promoted*”. Stakeholders bisa berupa seseorang, sekelompok orang ataupun lembaga yang berada di suatu tingkatan masyarakat.

Freeman dalam Morrison (2013) menyatakan bahwa *stakeholder* merupakan: “*Any group or individual that can affect, or is affected by the achievement of a corporation purpose*” Definisi tersebut menekankan bahwa *stakeholders* mampu mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan sebuah program, dan sekaligus memperoleh pengaruh dari pencapaian tujuan tersebut. *Stakeholders* menurut Nugroho (2015) disebutkan sebagai individu atau

sekelompok orang atau organisasi yang berkepentingan serta dapat memberi dampak dalam suatu kegiatan atau program pembangunan.

Analisis stakeholders menjadi salah satu cara untuk mencari informasi terkait dengan pihak-pihak mana saja yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh tiap-tiap keputusan atau kebijakan yang berlaku (Bryson dalam Hidayat, dkk, 2020). Dalam suatu pembangunan kepariwisataan, pada umumnya melibatkan tiga stakeholders diantaranya yaitu pemerintah, swasta, dan masyarakat. Masing-masing dari pemangku kepentingan tersebut memiliki peran dan fungsi yang berbeda sehingga diperlukan pemahaman yang mendalam agar pengembangan pariwisata suatu daerah dapat terlaksana dengan baik. Pemerintah bertugas dalam menyusun kebijakan serta perencanaan yang sistematis. Pihak swasta sebagai pelaku bisnis berperan dalam menyediakan sarana prasarana sebagai alat pendukung kepariwisataan, Sedangkan masyarakat sebagai pemilik dan pengelola dapat turut serta dalam menarik wisatawan dengan menjadi bagian dari atraksi wisata, seperti contoh mengenalkan kebudayaan dan kebiasaan sehari-hari yang menjadi ciri khas objek wisata.

Raum (dalam Hidayat, dkk, 2020) menyebutkan bahwa analisis stakeholders dilihat dengan sebuah pendekatan yang holistik agar memperoleh pemahaman tentang perubahan sistem yang ada didalamnya dengan cara mengidentifikasi stakeholdernya yang terlibat. Maryono dkk (dalam Yosevita, 2015) membedakan stakeholders menjadi tiga yaitu :

- Stakeholders primer atau utama, yaitu stakeholder yang memiliki dampak langsung baik dari rencana atau proyek dan memiliki kaitan kepentingan langsung dengan kegiatan tersebut.
- Stakeholders kunci, yaitu stakeholders yang memiliki kewenangan langsung dalam suatu legalitas pengambilan keputusan.
- Stakeholders pendukung, yaitu stakeholders yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap suatu program tetapi memiliki kepedulian besar terhadap proses pengembangan yang ada.

Stakeholders dibutuhkan untuk dapat mengetahui pihak-pihak mana saja yang memiliki keterlibatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Fungsi dan tanggung jawab dari masing-masing stakeholders harus difungsikan dengan optimal agar peran yang dijalankan nantinya dapat berdampak secara optimal. Adanya jalinan komunikasi antar stakeholders sangat penting dalam rangka menghasilkan kebijakan yang sesuai bagi pengembangan kepariwisataan.

Townsley (dalam Hidayah, dkk, 2019) mengklasifikasikan stakeholders menjadi dua kelompok diantaranya yaitu :

1. Stakeholders primer, yaitu stakeholders yang memiliki kepentingan langsung dengan sumber daya, baik sebagai mata pencaharian utama maupun terlibat dalam eksploitasi. Tiap stakeholders primer memiliki peran penting dan harus terlibat dalam tiap kegiatan yang berlangsung dalam program.

2. Stakeholders sekunder, adalah tiap stakeholders yang memiliki minat atau kepentingan tidak secara langsung pada setiap bisnis yang dihasilkan oleh sumber daya. Biasanya para stakeholders tidak dilibatkan secara langsung dalam tiap kegiatan yang terlaksana dalam program program yang berjalan.

Peran dan kepentingan masing masing stakeholders akan mempengaruhi hubungan kerjasama yang berjalan dalam pengembangan desa wisata. Dalam pelaksanaannya terdapat enam klasifikasi stakeholders utama yang dapat mempengaruhi dalam tiap tiap pengelolaan, pengembangan dan kebijakan mengenai kepariwisataan dalam kawasan yang berhubungan dengan keanekaragaman hayati menurut Dwyer & Edward (dalam Ardiansyah, 2021) diantaranya yaitu :

1. Sektor Publik
2. Sektor Privat
3. Lembaga Donor Bilateral dan Multilateral
4. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
5. Komunitas Lokal dan Penduduk Terasing
6. Konsumen

Berdasarkan penjabaran diatas mengenai stakeholders dapat disimpulkan bahwa stakeholders merupakan sekelompok orang yang memiliki kepentingan terhadap suatu pembangunan atau keberjalanan program atau kebijakan. Keterlibatan stakeholders dalam suatu manajemen pariwisata sangat diperlukan.

Tidak menyertakan salah satu dari perwakilan stakeholders akan merusak upaya pengembangan pariwisata kedepannya (Leakota dalam Simanjorang, dkk, 2020).

Selanjutnya untuk memperoleh informasi mengenai pengaruh masing masing kelompok kepentingan dilakukanlah identifikasi stakeholders (Bryson, dalam Hidayat, dkk, 2020). Dalam upaya mengidentifikasi stakeholders, pengelompokan stakeholders dibagi menjadi dua yaitu stakeholders primer dan stakeholders sekunder.

1.5.4.1 Peran Stakeholders

Masing masing *stakeholders* memiliki peranan dan tanggung jawab yang berbeda. Peran *stakeholders* dibutuhkan untuk dapat mengetahui kondisi keterlibatan masing masing pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Peran *stakeholders* perlu difungsikan dengan maksimal dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan bersama.

Menurut Nugroho (2015), dalam suatu pengelolaan kepariwisataan penjabaran peran *stakeholders* adalah sebagai berikut :

1. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Pengembangan sektor pariwisata secara optimal dapat tercapai jika dalam pertumbuhannya sejalan dengan usaha pengembangan dengan sektor sektor yang lain. Lembaga swadaya masyarakat menjadi salah satu unsur pendukung tercapainya hal tersebut. Peran serta lembaga lembaga ini sangat dibutuhkan baik secara langsung maupun tidak langsung.

- **Terlibat atau ikut berpartisipasi dalam pengelolaan potensi wisata**

Pemberdayaan anggota lebih berfokus pada peningkatan kualitas masyarakat terkait partisipasi dan keterlibatannya dalam suatu pembangunan potensi wisata. Peran serta lembaga swadaya masyarakat dapat diwujudkan karena manfaat yang dirasakan secara langsung melalui banyaknya lapangan kerja yang tersedia dan usaha jasa wisata yang dapat meningkatkan pendapatan sehari-hari. Situasi tersebut akan mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam berperan sebagai salah satu unsur pendukung pengembangan pariwisata.

- **Membuka usaha pendukung kegiatan pariwisata**

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh masyarakat akan meningkatkan rasa kepedulian masyarakat mengenai tempat mata pencaharian yang dimilikinya. Hal tersebut kemudian juga akan mendorong masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan sekitar potensi wisata. Usaha pendukung kegiatan pariwisata yang dilakukan juga diharapkan dapat membantu meningkatkan peluang masyarakat untuk menikmati manfaat dari potensi wisata dan membantu meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

2. Penduduk lokal

Penduduk lokal merupakan subjek dalam pengembangan suatu ekowisata. Sebagai subyek, pola pikir, kelembagaan lokal dan kearifan penduduk lokal dapat diadopsi dalam suatu proses perencanaan. Penduduk lokal dapat mengambil peran aktif dengan melalui peningkatan kualitas diri. Dalam fungsinya sebagai subyek, penduduk lokal memiliki peran dan tanggung jawab dalam bersama-sama mendukung keberhasilan pengembangan kepariwisataan di wilayahnya

Penduduk lokal berperan dengan turut berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang ada. Penduduk lokal juga membantu dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Interaksi antara pengunjung dan penduduk lokal juga dapat memberi dampak positif melalui pemahaman budaya antar keduanya.

3. Pemerintah

Pariwisata menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan pembangunan suatu wilayah. Bila dapat dijalankan dengan baik aspek tersebut nantinya akan dapat menjadi salah satu aspek yang dapat menunjang perekonomian wilayah terkait.

Maka dari itu diperlukan peran dari pemerintah sebagai :

- Fasilitator

Peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pengembangan kepariwisataan diantaranya yaitu sebagai penyedia dan pemberi fasilitas berupa objek wisata. Kesiapan sarana dan prasarana kepariwisataan merupakan salah satu aspek yang menentukan berhasilnya pengelolaan suatu industri pariwisata. Diperlukan adanya pembangunan dan pengelolaan sarana prasarana di daerah tujuan wisata dalam rangka mendukung pengelolaan pariwisata yang ada.

- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia pemerintah dilakukan melalui pelatihan profesional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada. Sumber daya manusia yang berkualitas menjadi ujung tombak dalam pengelolaan industri ini. Sumber daya manusia yang profesional menjadi tuntutan dalam persaingan global saat ini. Sangat tidak mudah mendapatkan hal tersebut, maka dari itu dibutuhkan upaya-upaya untuk meningkatkan keahlian dan

keampilan tenaga kepariwisataan, sehingga pada akhirnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah wisata menjadi hal positif dan berdaya guna. Wisata merupakan pintu masuk untuk pengembangan kebudayaan nasional maka dari itu pemerintah memiliki kepentingan yang besar.

4. Akademisi

Pihak akademisi dijadikan sebagai sumber saran dalam suatu perumusan kebijakan. Produk akademik yang dihasilkan dari pihak akademisi kemudian akan berguna bagi pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan yang ada nantinya. Produk akademik terdiri dari berbagai ide-ide pengembangan, konsep perencanaan dan pengelolaan. Pihak akademisi memiliki peran mendorong inovasi dan pengembangan produk dalam suatu kepariwisataan serta memberikan kesadaran akan pentingnya pariwisata berkelanjutan.

5. Konsumen (Pengunjung atau Wisatawan)

Konsumen (pengunjung atau wisatawan) adalah indikator penting untuk mendukung berlangsung pembangunan ekowisata. Pengunjung atau wisatawan yang terlayani dengan baik dapat memberikan *willingness to pay* bagi upaya konservasi di tempat dengan potensi wisata yang disajikan. Konsumen yang datang nantinya dapat menjadi sumber injeksi aliran perekonomian lokal dan sebagai pemberi insentif dalam pengelolaan lingkungan. Nilai positif yang nantinya diharapkan dapat menyebar ke khalayak ramai dalam rangka melahirkan rasa pengertian dan meningkatkan kepekaan dalam menjaga lingkungan. Selain itu konsumen juga berkontribusi dalam memberi *feedback* bagi keberlangsungan pengalaman yang diberikan selama mengunjungi potensi wisata.

Stakeholders merupakan pihak yang terdiri dari individu ataupun kelompok dengan kekuasaan maupun kepentingan dan terlibat dalam proses pelaksanaan kegiatan. Peran stakeholders diperlukan untuk mengatasi adanya keterbatasan pada suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Menurut Fendt (dalam Arrozaaq, 2016) terdapat beberapa alasan mengapa suatu organisasi membutuhkan peran pihak lain diantaranya yaitu :

- Organisasi tidak bisa menyelesaikan tugas tertentu seorang diri tanpa bantuan pihak lain,
- Keuntungan yang diperoleh organisasi dapat lebih besar jika ada keterlibatan pihak lain, dibandingkan dengan bekerja sendiri,
- Organisasi dapat menekan biaya produksi sehingga produk yang dihasilkan dapat lebih murah serta dapat bersaing dengan produk lain.

Menurut DeSeve (dalam Arifin, 2018) dalam mengukur keberhasilan terlaksananya suatu peran yaitu sebagai berikut :

- Tipe struktur jaringan, yang berhubungan dengan keterkaitan antar elemen yang diharapkan dapat menyatu/bekerjasama dalam mencapai tujuan.
- Komitmen pada tujuan, yaitu alasan keberadaan sebuah jaringan.
- Rasa saling percaya antar pelaku dalam jaringan yang ada.
- Governance, yaitu adanya kejelasan dalam system pengelolaan atau kepastian dari governance itu sendiri.
- Akses terhadap kekuasaan, ditandai dengan tersedianya aturan atau SOP

- Pembagian tanggung jawab, yaitu adanya pengelolaan bersama antar stakeholders terkait dalam pembuatan keputusan sehingga tujuan bisa terlaksana
- Informasi terkait dengan kemudahan akses, perlindungan privacy serta batasan akses bagi non anggota.
- Akses bagi sumberdaya terkait sumber keuangan, teknis, manusia, serta sumber daya lain guna meraih tujuan bersama.

Berdasarkan penjabaran diatas mengenai peran stakeholders dapat disimpulkan bahwa peran stakeholders merupakan suatu kegiatan dimana berbagai stakeholders melakukan peran dan tanggung jawabnya untuk mencapai suatu keberhasilan tujuan yang telah disepakati bersama, serta membutuhkan adanya kriteria tertentu untuk dapat menilai keberhasilan tersebut. Penting untuk memahami peran dan tanggung jawab dari para stakeholders tersebut agar pembangunan kepariwisataan dapat terwujud dan terlaksana dengan baik (Simanjorang, dkk, 2020).

Selama melaksanakan peran dan tanggung jawab tersebut, maka penjabaran peran *stakeholders* diantaranya dibagi menjadi 1) lembaga swadaya masyarakat, 2) penduduk lokal, 3) pemerintah, 4) akademisi, 6) konsumen, dan 7) swasta untuk mempermudah dalam pembagian peran dari masing-masing stakeholders yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Jaitrejo, Semarang.

1.5.5 Faktor Pendorong dan Penghambat

Analisis faktor pendorong dan penghambat keberlangsungan peran stakeholders dalam pengembangan Desa Wisata Jatirejo dilakukan dengan penjabaran melalui pendapat Destiana, dkk (2020) bahwa dalam pengembangan pariwisata terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menganalisis faktor pendorong dan penghambat yang ada dalam suatu kegiatan.

1. Nilai

Nilai merupakan prinsip-prinsip sosial, tujuan, atau standar yang dipakai atau diterima oleh suatu individu, kelas, masyarakat dan lain lain. Nilai mencakup segala hal yang dianggap bermakna dalam kehidupan seseorang. Menurut Destiana, dkk (2020) nilai dibagi menjadi empat yaitu :

- Nilai individual, diciptakan melalui peran suatu pemimpin. Kepemimpinan yang baik merupakan hal yang perlu diperhatikan untuk mencapai suatu koordinasi yang sukses (Olovsson (dalam Destiana, dkk, 2020)). Nilai individu merupakan nilai yang menjadi pedoman bagi individu dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Integritas antara kepentingan publik dengan nilai individu harus dapat disatukan sehingga dapat mencapai kebijakan negara berorientasi publik (Ramadani, 2022).
- Nilai profesional, merupakan suatu prinsip dasar dalam praktek dan panduan dalam membuat sebuah keputusan. Nilai ini menjadi faktor penting dalam memiliki komitmen profesional.

- Nilai legalitas, mendukung aspek kerjasama stakeholders didasari oleh konstitusi negara. Adanya perubahan konstitusi dapat mengubah berbagai kebijakan yang ada.
- Nilai organisasi, merupakan nilai yang tumbuh dalam sebuah lingkungan organisasi. Nilai ini harus mencerminkan hal hal penting yang dimiliki sebuah organisasi. Apabila terdapat suatu perubahan, kemungkinan akan menimbulkan terjadinya konflik.

2. Komunikasi

Komunikasi yang efektif menjadi pendorong dalam hubungan kerjasama antar stakeholders yang terlibat dalam suatu pengembangan pariwisata (Destiana, dkk, 2020). Komunikasi yang efektif dapat meningkatkan taraf keingintahuan seseorang tentang potensi wisata yang menjadi pokok pembahasan. Terdapat beberapa indikator yang menjadikan komunikasi dinilai sebagai komunikasi yang efektif menurut Sutardji (dalam Nuraeni, 2022), diantaranya yaitu.

- Pemahaman, yaitu kemampuan untuk memahami pesan persis seperti yang dipahami oleh komunikator. Tujuan dari komunikator sendiri adalah untuk menimbulkan saling pengertian untuk mencapai tujuan sehingga komunikator dan komunikan harus saling memahami.
- Kesenangan, untuk membangun suasana santai dan menyenangkan sehingga komunikator dan komunikan lebih nyaman berinteraksi.
- Pengaruh pada sikap, merupakan salah satu tujuan dilakukannya komunikasi.

- Hubungan yang makin baik, jika seseorang sudah berbagi persepsi, karakter dan kecocokan yang sama antara satu sama lain maka hubungan komunikasi yang terjalin sudah semakin baik.
- Tindakan, komunikasi akan efektif jika telah terjadi adanya perubahan pada tindakan kedua pihak.

3. Kepercayaan

Kepercayaan dipupuk oleh rasa komitmen dengan berbagai informasi dan keahlian dalam mengkonsolidasi hubungan antara para pihak. Hubungan antar stakeholders harus terus diperhatikan agar kerjasama yang terjadi dapat berjalan dengan baik. Jika kepercayaan antar stakeholders terbangun dengan baik maka kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan keberlangsungan pengembangan desa wisata akan berjalan dengan baik. Sejalan dengan pendapat ini, Mayer et.al (dalam Rofiq, 2007) mengemukakan bahwa terdapat tiga dimensi yang menjadi indikator kepercayaan.

- Kemampuan, mengacu pada kompetensi dan karakteristik suatu pihak untuk mempengaruhi pihak sasaran.
- Kebaikan hati, kemauan suatu pihak untuk memberikan kepuasan yang saling menguntungkan antara dirinya dan pihak sasaran.
- Integritas, berkaitan dengan perilaku suatu pihak dalam memberikan informasi kepada pihak sasaran. Meliputi kebenaran mengenai ucapan yang dikatakan.

4. Kebijakan

Kebijakan pemerintah dijadikan sebagai landasan stakeholders dalam suatu pengembangan pariwisata (Judisseno dalam Ramadani, 2022). Pemerintah bertanggung jawab membuat kebijakan agar pihak luar pemerintah memiliki pijakan dalam pengembangan pariwisata. Keterlibatan pemerintah lebih pada aspek pembuatan kebijakan dan mendorong pertumbuhan dan semaksimal mungkin menghapus hambatan birokrasi (Destiana, 2020). Pada pengembangan Desa Wisata Jatirejo dilandasi oleh kebijakan yaitu Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 556/819 Tahun 2017 Tentang Penetapan Desa Wisata Kota Semarang.

Berdasarkan pendapat Destiana, dkk (2020) dapat disimpulkan bahwa penting bagi suatu pihak untuk menganalisis adanya faktor pendorong dan penghambat dalam keberlangsungan pengembangan pariwisata. Upaya menganalisis tersebut dilakukan berdasarkan beberapa faktor diantaranya yaitu nilai, komunikasi, kepercayaan, dan kebijakan.

1.5.6 Pengembangan Desa Wisata

Desa wisata adalah suatu wilayah perdesaan yang memiliki potensi keunikan dan daya tarik wisata yang khas, baik berupa karakter fisik lingkungan alam pedesaan dan kehidupan sosial budaya masyarakat, yang dikelola dan dikemas secara menarik dan alami dengan pengembangan fasilitas pendukung wisatanya (Mertha dkk, 2018).

Inskeep (1991) menyatakan bahwa: *“Village Tourism, where small groups of tourist stay in or near traditional, often remote villages and learn about village life and the local environment.”* Pengertian tersebut menegaskan bahwa Desa Wisata memiliki

ciri dan nilai tertentu yang dapat menjadi daya tarik khusus bagi wisatawan minat khusus (*special interest tourist*) terhadap kehidupan pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan warga desa yang unik dan tidak dapat ditemukan di perkotaan merupakan daya tarik utama dari sebuah desa wisata.

Selanjutnya desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku (Nuryanti, 1993). Pengembangan desa wisata di Indonesia dilakukan sebagai bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia. Pelaksanaan pengembangan Desa Wisata tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.26/UM.010/MKP/2010 mengenai Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata.

Agar manfaat wisata perdesaan dapat optimal dirasakan oleh masyarakat lokal, maka terdapat sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi sebagai konsep pengembangan desa wisata, yaitu: (1) berawal dan diinisiasi oleh masyarakat desa, (2) memiliki muatan lokal, (3) memiliki komitmen bersama masyarakat untuk memajukan desa, (4) memiliki kelembagaan sebagai pengelola desa wisata, (5) adanya keterlibatan dan partisipasi warga desa, (6) adanya pendampingan dan pembinaan, (7) adanya motivasi yang kuat untuk memperbaiki kehidupan warga desa, (8) adanya kemitraan, (9) adanya forum komunikasi antar warga maupun dengan stakeholder yang lain, dan (10) adanya studi pengembangan desa wisata dan orientasi (Julianto, 2014).

1.6 Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep merupakan penjabaran dari konsep atau variabel penelitian dalam sebuah rincian yang terukur. Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan untuk mengidentifikasi *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Jatirejo untuk kemudian diidentifikasi peran dari masing masing *stakeholders* yang ada dan faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhinya.

1. Peran *Stakeholders*

Peran *stakeholders* merupakan perilaku yang diharapkan seseorang untuk pihak pihak yang terlibat dalam setiap pengelolaan program. Masing masing *stakeholders* memiliki peran yang berbeda satu sama lain, namun memiliki tujuan yang sama yaitu sama sama memajukan organisasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan klasifikasi *stakeholders* sebagaimana yang dikemukakan oleh Townsley (dalam Hidayah, dkk, 2019) yang membagi *stakeholders* menjadi dua yaitu :

- A. *Stakeholders* Primer, stakeholder dengan kepentingan langsung dalam sumberdaya, baik sebagai mata pencaharian ataupun pihak pihak yang terlibat langsung dalam suatu eksploitasi.
- B. *Stakeholders* Sekunder, *stakeholders* yang memiliki kepentingan secara tidak langsung dalam suatu program dan kegiatan yang sedang berjalan.

Selanjutnya untuk konsep peran *stakeholders* dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan teori peran *stakeholders* menurut Nugroho (2015) sebagai berikut.

- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), salah satu unsur pendukung tercapainya hasil pengembangan sektor pariwisata yang optimal. Beberapa peranan LSM diantaranya yaitu 1) terlibat atau ikut berpartisipasi dalam pengelolaan potensi wisata, dan 2) membuka usaha pendukung kegiatan pariwisata.
 - Konsumen (Pengunjung/Wisatawan), berperan sebagai pemberi *feedback* bagi keberlangsungan pengalaman yang diberikan selama mengunjungi potensi wisata. Konsumen yang terlayani dengan baik juga dapat memberikan *willingness to pay* bagi upaya upaya konservasi di tempat dengan potensi wisata yang disajikan.
 - Penduduk lokal, berperan sebagai subyek. Sebagai subyek, penduduk mengambil peran aktif dalam peningkatan pendidikan dan ketrampilan. Penduduk lokal juga berperan dengan turut berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang ada.
 - Pemerintah, sebagai salah satu aspek penting dalam pengembangan suatu wilayah. Beberapa peranan pemerintah diantaranya yaitu 1) pemerintah sebagai fasilitator, dan 2) peningkatan kualitas sumber daya manusia
 - Akademisi, berperan sebagai ujung tombak yang berhadapan langsung dengan stakeholders masyarakat, swasta dan dunia internasional.
2. Faktor faktor yang menjadi pendorong dan penghambat dalam keberlangsungan peran *stakeholders* dalam pengembangan Desa Wisata Jatirejo. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis faktor pendorong dan penghambat diantaranya yaitu.

- Nilai, yang dibagi menjadi empat yaitu 1) nilai individual, 2) nilai profesional, 3) nilai legalitas, 4) nilai organisasi,
- Komunikasi, jika komunikasi dilakukan secara efektif antar stakeholders maka hubungan kerjasama yang terjalin akan berjalan sesuai tujuan bersama. Indikator pengaruh terdiri dari : 1) pemahaman, 2) kesenangan, 3) pengaruh pada sikap, 4) hubungan yang makin baik, 5) Tindakan.
- Kepercayaan, hubungan yang harus terus diperhatikan antara pihak stakeholders satu dengan yang lain untuk menghindari terjadinya permasalahan. Indikator pengaruh terdiri dari 1) kemampuan, 2) kebaikan hati, 3) integritas
- Kebijakan, sebagai landasan stakeholders dalam pengembangan pariwisata.

1.7 Argumen Penelitian

Sektor pariwisata saat ini menjadi salah satu ujung tombak penggerak pertumbuhan Indonesia. Perkembangan ini diharapkan dapat turut meningkatkan jumlah penerimaan devisa negara, peningkatan penyerapan tenaga kerja pariwisata, dan kenaikan indeks daya saing pariwisata Indonesia di kancah internasional. Kepariwisataan akan berkembang baik jika dalam pengelolaannya dilakukan dengan baik. Salah satu prinsip pembangunan berkelanjutan yang ada yaitu desa wisata yang memanfaatkan keunikan dan daya tarik pedesaan sebagai produk wisata. Keberadaan desa wisata kini juga memiliki daya pikat yang potensial.

Adapun salah satu desa wisata yang kini masih dalam tahap pengembangan yaitu Desa Wisata Jatirejo yang terletak di Kota Semarang. Namun sebagai suatu desa wisata, Jatirejo masih belum mampu dikembangkan secara optimal. Beberapa kendala diantaranya meliputi belum optimalnya kemampuan/kompetensi pihak internal sehingga menyebabkan kurangnya kesiapan masyarakat dalam menghadapi keberadaan desa wisata dan belum adanya tindakan promosi yang efektif. Hal ini terjadi dikarenakan belum adanya kolaborasi yang belum efektif antar para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Jatirejo ini. Walaupun Desa Jatirejo telah membangun jejaring kerja sama dengan beberapa pihak, seperti pemerintah daerah melalui dinas terkait, dan akademisi melalui perguruan tinggi. Namun dalam pelaksanaannya masing masing dari *stakeholders* belum mampu memenuhi peran sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan adanya beberapa permasalahan.

Dalam rangka mencapai perubahan ke arah yang lebih baik, maka diperlukan untuk menganalisis peran masing-masing *stakeholders* yang terlibat dalam pengembangan Desa Wisata Jatirejo. Sedangkan untuk mendorong perubahan diperlukan kekuatan pendorong dan meminimalisir kekuatan penghambat, hal ini dapat dilakukan dengan menganalisis mengenai hal hal yang menjadi factor pendorong dan penghambat dalam keberlangsungan pengembangan kepariwisataan di Desa Wisata Jatirejo.

1.8 Metode Penelitian

Metode merupakan keseluruhan proses berpikir yang diawali dengan menemukan permasalahan, kemudian menjabarkannya kedalam sebuah kerangka teoritis tertentu, pengumpulan data untuk pengujian empiris, sampai dengan penjelasan dan penarikan gejala sosial yang diteliti. Sugiyono (2013:2) menyatakan bahwa metode penelitian merupakan kumpulan usaha yang dilakukan untuk menemukan dan menguji kebenaran dari fenomena yang akan diteliti dengan berbagai cara ilmiah yang bersifat empiris, sistematis, serta rasional

Bogdan dan Taylor (dalam Strauss, 2003) mendefinisikan metodologi penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode penelitian kualitatif ini digunakan untuk mengungkap, memahami serta buntut mendapatkan wawasan tentang sesuatu di balik fenomena yang baru sedikit diketahui atau bahkan belum diketahui sama sekali. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif ini pula, dapat diperoleh rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit untuk diungkapkan oleh metode penelitian kuantitatif.

Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan harapan mampu menggambarkan tentang bagaimana analisis peran stakeholders dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatirejo, Kota Semarang, sehingga data yang didapat bersifat kredibel dan bermakna untuk mencapai apa yang menjadi tujuan pada penelitian ini.

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan tentang bagaimana analisis peran stakeholders dalam pengembangan pariwisata di Desa Wisata Jatirejo, Kota Semarang. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, artinya peneliti memberikan uraian secara deskriptif mengenai gambaran obyek masalah yang diteliti kemudian memecahkan permasalahan berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari penelitian. Jenis penelitian ini akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang serta perilaku yang diamati (Moleong, 2010:9).

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Wisata Jatirejo yang terletak di Kecamatan Gunungpati, Kota Semarang, Jawa Tengah. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan secara sengaja (*purposive*). Hal ini dilakukan karena Desa Wisata Jatirejo merupakan salah satu wisata alam yang terletak di daerah Kota Semarang yang memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut.

1.8.3 Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini pihak yang dijadikan informan adalah yang dianggap mempunyai informasi (*key-informan*) yang dibutuhkan di wilayah penelitian. Cara yang digunakan untuk menentukan informasi kunci tersebut maka penulis menggunakan “*purposive sampling*” atau sampling bertujuan, yaitu teknik

sampling yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya (Arikunto, 2009: h.128). Penentuan informan dilakukan dengan berdasarkan maksud dan tujuan penulis.

Tabel 1.7 Informan Penelitian

No	Status/Jabatan	Jumlah
1	Perwakilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang	1
2	Perwakilan Kelurahan Jatirejo	1
3	Pokdarwis Desa Jatirejo	1
4	Perwakilan Karang Taruna	1
5	Perwakilan Akademik	1
6	Penduduk lokal	2
7	Perwakilan Kelompok Tani	1
8	Perwakilan Kelompok UMKM	1
7	Perwakilan Kecamatan Gunungpati	1
8	Pengunjung/Wisatawan	1

1.8.4 Jenis Data

Data adalah suatu bahan mentah yang jika diolah dengan baik melalui berbagai analisis dapat menyajikan berbagai informasi. Data tersebut merupakan sifat atau karakteristik dari sesuatu yang diteliti (Notoatmodjo, 2010:180). Jenis data

yang disajikan dalam penelitian ini adalah data non-numerik. Data ini mencakup analisa kondisi, data wawancara, data observasi, catatan-catatan dari permasalahan yang pernah dihadapi.

1.8.5 Sumber Data

Pada penelitian ini digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah:

a) Data primer

Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan oleh orang yang berkepentingan atau dengan kata lain merupakan suatu data yang diperoleh dari pihak pertama secara langsung, seperti hasil kumpulan wawancara atau hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti. Data tersebut diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para informan yang bersangkutan serta observasi lapangan secara langsung di Desa Wisata Jatirejo, Kota Semarang.

b) Data Sekunder

Hasan (2002: h.82) berpendapat bahwa data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui orang yang telah melakukan penelitian dengan melibatkan sumber sumber yang telah ada. Untuk melengkapi data penelitian, maka data sekunder juga diperoleh dari dokumen mengenai jumlah kunjungan selama lima tahun terakhir serta dokumen lain yang

bersangkutan tentang pengembangan Desa Wisata Jatirejo, Kota Semarang.

1.8.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk mendapatkan hasil penelitian yang berkualitas, kualitas dalam pengumpulan data mutlak diperlukan. Kualitas pengumpulan data sangat dipengaruhi oleh ketepatan cara yang digunakan dalam proses pengumpulan data (Sugiyono, 2016:187). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Observasi

Observasi merupakan proses pengamatan yang dilakukan secara sistematis dengan memperhatikan gejala-gejala yang muncul dalam suatu objek penelitian. Terdapat dua tipe observasi yaitu observasi secara langsung dan observasi secara tidak langsung (Rachman, 1999: h.77).

Pengumpulan data melalui observasi yang dilakukan diantaranya yaitu :

1. Pengamat memiliki peran yaitu sebagai pengamat dan anggota resmi dari organisasi atau kelompok yang diamati.

2. Pengamat tidak memiliki peran, hanya mengadakan pengamatan saja.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi langsung yaitu di Desa Wisata Jatirejo, Kota Semarang. Pengamatan dilakukan sendiri secara langsung di tempat yang menjadi objek penelitian.

b) Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Moleong (2002: h.135) berpendapat bahwa wawancara sendiri merupakan percakapan antara penanya dengan penjawab dari pertanyaan tersebut berdasarkan maksud tertentu. Percakapan yang terjadi dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) dan pihak yang diwawancarai (*interviewee*).

Beberapa pembagian jenis wawancara yang dikemukakan oleh Patton (dalam Moleong, 2002:h.197) diantaranya yaitu:

- a. Pendekatan dengan petunjuk umum wawancara, dengan karakteristik sebagai berikut :
 1. Pewawancara membuat kerangka yang akan ditanyakan dalam proses wawancara.
 2. Menyusun hal hal pokok yang perlu dilakukan.
 3. Pokok pokok yang sebelumnya dirumuskan tidak perlu ditanyakan dengan urutan.
 4. Penggunaan dan pemilihan kata yang digunakan dalam wawancara tidak perlu dilakukan sebelumnya.
 5. Petunjuk wawancara berisi petunjuk yang dibuat secara garis besar mengenai proses dan isi wawancara
- b. Wawancara baku terbuka, adalah wawancara yang menggunakan pertanyaan baku.

c. Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berdasarkan pada catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, notulensi rapat, dan sebagainya (Arikunto, 2006:135). Dalam penelitian ini studi dokumentasi digunakan untuk menyempurnakan data yang diperoleh lewat wawancara mendalam. Data-data yang diambil dari dokumen hanya meliputi gambaran umum wilayah penelitian, yang diperoleh dari data monografi Desa Wisata Jatirejo, Kota Semarang, yang meliputi: luas wilayah, jumlah penduduk, mata pencaharian penduduk, sarana perekonomian, dan tingkat pendidikan serta sarana umum. Serta data berupa jumlah pengunjung selama lima tahun terakhir.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Moleong (2002: h.103) berpendapat bahwa analisis data merupakan proses mengurutkan data yang telah didapatkan dilapangan kedalam pola, kategori ataupun satuan urian dasar sehingga nantinya dapat ditemukan hipotesis kerja. Analisis data menggunakan deskriptif kualitatif dengan pembahasan penelitian dan hasilnya diuraikan dengan melalui kata kata. Data yang didapatkan dalam penelitian ini adalah data yang memiliki sifat kualitatif, lalu analisis yang digunakan adalah non statistic.

Langkah-langkah dalam menganalisis data penelitian, yaitu sebagai berikut

:

a) Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data bertujuan untuk membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data agar dapat diperoleh kesimpulan. Dalam penelitian ini, proses reduksi data dilakukan dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian dipilih dan dikelompokkan berdasarkan kemiripan data.

b) Penyajian data

Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi secara tersusun untuk kemudian dapat menghasilkan suatu kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c) Verifikasi Data dan Penarikan Kesimpulan

Verifikasi data merupakan proses menguji kebenaran dari suatu data yang telah disusun. Sedangkan penarikan kesimpulan merupakan hasil dari pemahaman data yang dibuat dalam pernyataan singkat.

1.8.8 Kualitas Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pengujian kredibilitas data untuk menjadi kualitas dari penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2013), pengujian validitas dan realibilitas dalam penelitian kualitatif meliputi uji

kredibilitas yang terdiri dari beberapa tahapan seperti perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, melibatkan teman sejawat dan member checking untuk menjamin serta memastikan kualitas penelitian kualitatif ini berdasarkan riset lapangan yang dilakukan.

1. Pengujian Kredibilitas Data

Uji kredibilitas data dilakuakn dengan melalui perpanjangan pangamatan, peningkatan ketekunan penelitian, triangulasi, diskusi teman sejawat, dan member check. Tujuan dilakukannya uji kredibilitas data adalah untuk mendapatkan data mendalam mengenai subyek penelitian (Sugiyono, 2007: h.270). Pengujian kredibilitas data diantaranya yaitu :

1. Perpanjangan pengamatan

Moelong (2002: h.327) berpendapat bahwa perpanjangan pengamatan dilakukan jika data yang telah diperoleh masih kurang memadai.

2. Peningkatan ketekunan

Peningkatan ketekunan adalah dengan melakukan pengamatan lebih mendalam untuk mendapatkan data yang lebih pasti. Dapat dilakukan dengan membaca referensi buku ataupun dokumen terkait topik penelitian..

3. Triangulasi

Sugiyono (2007: h.225) berpendapat bahwa triangulasi adalah kegiatan analisis yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang terjadi akibat dari kajian yang mengandalkan satu teori saja. Menurut Sugiyono (2007: h.273) terdapat minimal tiga macam triangulasi diantaranya yaitu 1) triangulasi teknik pengumpulan data, 2) triangulasi teknik pengumpulan data, 3) triangulasi waktu pengumpulan data

4. Pemeriksaan teman sejawat

Pemeriksaan teman sejawat dilakukan melalui diskusi data hasil temuan dengan rekan sesama mahasiswa ataupun teman yang bukan merupakan seorang mahasiswa. Dalam diskusi tersebut maka nantinya akan ditemukan berbagai masukan dan saran yang berguna untuk keberlangsungan proses penelitian.

5. Analisis kasus negatif

Menurut Sugiyono (2007: h.275) analisis kasus negatif adalah proses mencari data yang berbeda ataupun bertentangan dengan data yang telah ditemukan di lapangan.

6. Member Check

Member check dapat dilakukan dengan cara diskusi hasil penelitian kepada sumber yang telah memberikan data. Pengecekan dilakukan melalui

beberapa cara berikut diantaranya yaitu 1) penilaian dilakukan oleh responden, 2) mengoreksi kesalahan, 3) menyediakan tambahan informasi dengan sukarela, 4) memasukan responden kedalam kancan penelitian, 5) menilai kecukupan data yang dikumpulkan.